















perjanjian mereka yang berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur dengan harga yang dinaikkan setinggi 20% hingga 80%. Menurut tinjauan hukum Islam praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk, *pertama* utang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. *Kedua*, utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan kehidupan dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.<sup>7</sup>

2. Mudzakir Ma'aruf dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang dengan Pembayaran Berupa Gabah di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", tahun 2013. yang menyatakan bahwa pihak petani meminjam uang untuk keperluan yang mendesak kepada tengkulak yang akan dilunasi oleh petani tersebut ketika masa panen berupa gabah. Akan tetapi pada saat pengembalian tengkulak melakukan potongan terhadap harga umum yang sudah ada sehingga merugikan salah satu pihak yakni petani. Menurut hukum Islam bahwa model hutang piutang

---

<sup>7</sup> Lina Fajrinah, "Hutang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2009).



4. Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (*Murābahah*) dari Utang Piutang di Desa Sawo Babat”, tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, bahwa praktik hutang uang dengan sistem jual beli barang di desa tersebut pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang yang berbentuk uang tunai melainkan barang untuk dihutangkan dan dijual kembali dengan ketentuan harga standart oleh pihak yang berhutang. Dalam pengembaliannya pihak yang berhutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan untuk melunasinya. Menurut hukum Islam mengenai hal tersebut adalah sah karena ditinjau dari berbagai sudut obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengembalian hutang didasarkan kerelaan pada kedua belah pihak. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi *murābahah* sehingga diperbolehkan menurut al-Qur’an, hadis maupun pendapat para ulama’.<sup>10</sup>

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang dengan Pelunasan Barang di Desa KedungringinKecamatan Beji Kabupaten Pasuruan” ini membahas tentang bagaimana proses akad utang piutang uang dengan pelunasan barang dan pandangan hukum Islam terhadap

---

<sup>10</sup> Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (*Murābahah*) dari Piutang Di Desa Sawo Babat”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Sayariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, 2008).



















